



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**
LEMBAGA : **PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**
UNIT KERJA : **PLN KANTOR PUSAT**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR HARDIYANTO**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT SISTEM INFORMASI DAN MONITORING INVESTASI PROYEK**
3. NHK : **215737**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.875.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 553 m2/250 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/45 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.215.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 486 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.215.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/378 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.845.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.019.175.000**

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000
2. LAINNYA, HIDROLIK (KOMPRESSOR) PERALATAN MESIN LAINNYA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



4. MOBIL, MAZDA KURO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
612.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.661.743.880
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.561.918.880
III. HUTANG	Rp.	247.335.137
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.314.583.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.